BAB I
PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi ekonomi yang sedang mendapatkan perhatian pemerintah. Koperasi merupakan organisasi yang berbadan hukum. Pembangunan koperasi di Indonesia merupakan bagian dari pembangunan nasional secara keseluruhan. Koperasi harus di bangun untuk menciptakan usaha dan pelayanan yang berdasar azas kekeluargaan. Usaha koperasi adalah usaha yang sesuai dengan demokrasi ekonomi, karena di dalam demokrasi ekonomi terdapat unsur-unsur usaha koperasi.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa :

> **"perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan."**

Penjelasan Pasal 33 menempatkan koperasi baik dalam kedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral dari tata perekonomian Nasional.

Memperhatikan kedudukan koperasi seperti tersebut di atas maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.

Kegiatan ekonomi seperti ini koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi rakyat. Tapi dalam

perkembangan ekonomi yang berjalan demikian cepat, pertumbuhan koperasi selama ini belum sepenuhnya menampakkan wujud dan perannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, untuk menyelaraskan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis perlu adanya penerapan yang konsisten sesuai kaidah ekonomi dalam pengelolaan yang mampu mendorong koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri.

Pembangunan koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional. Pengembangan diarahkan agar koperasi benar-benar menerapkan prinsip koperasi dan kaidah ekonomi dalam pengelolaannya. Pembinaan koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar koperasi menjalankan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Organisasi koperasi harus mencerminkan kekuatan yang memberikan kepercayaan bagi angggota, masyarakat dan badan usaha lainnya dalam melaksanakan hubungan kerjasama. Untuk mencapai tujuan tersebut maka organisasi harus mempunyai manajemen yang baik dan organisasi tangguh yang efektif dan efisien.

Perkembangan koperasi pada dasarnya tergantung pada Sumber Daya Manusia yaitu orang-orang yang mengelolanya. Sumber Daya Manusia perananannya sangat dominan, baik sebagai perencana maupun sebagai pelaksana dari suatu kegiatan organisasi. Sumber Daya Manusia yang dimaksudkan adalah karyawan. Karyawan mempunyai peranan penting sebagai penghubung antara penterjemah kebijaksanaan yang dihasilkan Rapat Anggota Tahunan (RAT)

dengan anggota koperasi yang menerima hasil kebijaksanaan itu. Seperti dalam kegiatan sehari-hari, karyawanlah yang langsung memberikan pelayanan kepada anggota. Oleh karena itu karyawan harus mempunyai kemampuan yang memadai, keterampilan, pengalaman dan pengetahuan sesuai dengan bidangnya. Dengan demikian pencapaian efektivitas kerja dapat terwujud melalui pelaksanaan deskripsi jabatan yang benar-benar menguraikan secara jelas mengenai tugas, jabatan, dan peran apa saja yang harus dilakukan. Ini mengandung arti bahwa karyawan yang mengelola kegiatan-kegiatan usaha koperasi harus mengetahui dan memahami tugas, wewenang dan tanggungjawab yang diembannya.

Deskripsi jabatan merupakan suatu ikhtisar data yang selektif yang diberikan oleh laporan analisis jabatan. Deskripsi jabatan (pekerjaan) menjelaskan tentang perincian tugas dan tanggung jawab, serta kondisi-kondisi dimana jabatan itu dilakukan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja atau pegawai untuk memangku suatu jabatan.

Deskripsi jabatan sangat penting guna meningkatkan tercapainya efektivitas kerja, terutama dengan adanya pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab sehingga dapat terjalin kerjasama yang baik dalam melaksanakan kewajiban untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pencapaian sasaran tersebut pada dasarnya untuk mewujudkan tujuan organisasi. Deskripsi jabatan bukan merupakan satu-satunya faktor yang menentukan pencapaian tujuan secara efektif, namun akan berpengaruh terhadap realisasi penyelesaian suatu pekerjaan secara kuantitas, kualitas dan waktu sesuai dengan rencana program kerja yang telah ditetapkan.

Dari sekian banyak koperasi yang ada di Kabupaten Sumedang, salah satunya adalah Koperasi Keluarga Besar Ikopin yang beralamatkan Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor, Jl. Jatinangor KM. 20, 5, Cibeusi, Sumedang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363 ini memiliki Badan Hukum No. 02/KEP/PAD/XIII/518 Diskop.UKM/VII/2005 Tanggal 23 Desember 2005. Dengan jumlah anggota per 31 Desember 2019 yaitu 2334 orang anggota, dan memiliki sebelas unit usaha yaitu TD Mart KKB Ikopin, Unit Pengadaan ATK dan Foto Copy, Unit Perdagangan Umum dan Jasa, Sewa, Ampera, LPK KKB, Unit Kantin, USP I KKB Ikopin, USP II KKB Ikopin, USP III KKB Ikopin, USP IV KKB Ikopin yang dikelola oleh 3 orang pengurus, 2 orang pengawas dan 34 orang karyawan sampai akhir tahun 2019. Dari semua unit usaha yang ada di Koperasi Keluarga Besar Institut Manajemen Koperasi Indonesia peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Unit Simpan Pinjam dikarenakan ditemukan beberapa fenomena sebagai berikut:

Tabel 1.1. Data Pencapaian Target Dan Realisasi Pendapatan Dan Belanja Unit Simpan Pinjam KKB IKOPIN Tahun 2019

NO	Unit Usaha	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	TD Mart	Rp. 386.193.407	Rp. 362.127.423	93,77%
2	Kantin	Rp. 683.018.143	Rp. 572.449.673	83,81%
3	Foto Copy	Rp. 489.260.918	Rp. 451.389.800	92,26%
4	Perdagangan & Jasa	Rp. 11.990.000	Rp. 10.361.000	86,41%
5	Sewa	Rp. 171.000.000	Rp. 164.405.977	96,14%
6	LPK	Rp. 30.000.000	-	0,00%
7	Ampera	Rp. 180.000.000	Rp. 180.000.000	100,0%
8	Unit Simpan Pinjam 1	Rp. 704.084.390	Rp. 547.604.777	77,78%
9	Unit Simpan Pinjam 2	Rp. 711.870.390	Rp. 628.956.495	88,35%
10	Unit Simpan Pinjam 3	Rp. 582.904.671	Rp. 512.572.422	87,93%
11	Unit Simpan Pinjam 4	Rp. 279.270.525	Rp. 532.540.510	190,69%

Sumber: Laporan Tahunan Tahun Buku 2019

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui dan disimpulkan bahwa target dan realisasi Unit Usaha Koperasi Keluarga Besar Institut Manajemen Koperasi Indonesia ditahun buku terakhir yaitu tahun Buku 2019 yang mencapai target bahkan melebihi target hanya unit simpan pinjam 4, sedangkan untuk unit lainnya tidak mencapai target yang telah ditentukan Rapat Anggota Tahunan. Dari data tersebut memang kinerja usaha KKB belum sepenuhnya dapat dikatakan baik dikarenakan ada beberapa unit usaha yang belum bisa mencapai target.

Dari semua unit usaha yang ada, penelitian akan difokuskan pada usaha unit simpan pinjam. Karena dilihat dari kontribusi USP terhadap pendapatan koperasi cukup besar, tetatpi target-targetnya belum tercapai. Pada Unit Simpan Pinjam 1, 2, dan 3 awalnya bernama Swamitra 1, 2, dan 3 yang merupakan kolaborasi dengan Bank Bukopin dan nasabahnya berasal dari masyarakat yang bukan anggota koperasi. Pada tahun 2019 berubah nama menjadi Unit Simpan Pinjam 1, 2, 3 dan semua nasabanya harus menjadi anggota koperasi. Hal ini sangat berpengaruh terhadap menurunnya jumlah nasabah yang kurang memahami koperasi.

Efektivitas kerja karyawan menggambarkan hasil kerja yang diperoleh karyawan dibandingkan dengan target yang direncanakan. Semakin besar pencapaian target tersebut, semakin tinggi pula efektivitas kerja karyawan. Untuk mencapai efektivitas kerja yang tinggi, maka semua unsur yang terlibat dalam pekerjaan dan pengelolaan koperasi harus mampu mencapai hasil maksimal dalam pekerjaan. Pencapaian hasil maksimal tersebut ditentukan oleh karyawan yang

mampu melaksanakan tugas dengan baik, karyawan tersebut dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan dapat mencapai target yang telah ditentukan.

Mengingat koperasi adalah badan usaha yang berbeda dengan badan usaha milik kapitalis, maka pengukuran efisiensi koperasi harus dibedakan dengan perusahaan kapitalis. Perusahaan kapitalis yang berorientasi pada perolehan keuntungan yang besar, sangat tepat apabila mengukur efisiensi berdasarkan keuntungan (SHU) yang diperbandingkan dengan besarnya uang yang dikeluarkan untuk menghasilkan keuntungan tersebut. Koperasi yang berorientasi pada upaya memaksimalkan pelayanan kepada anggotanya sudah barang tentu tidaklah tepat jika hanya menggunakan kriteria keuntungan untuk mengukur efisiensi koperasi, tetapi lebih tepat bila memadukan keuntungan yang diperoleh koperasi dengan efek koperasi tersebut kepada anggotanya.

Koperasi yang berhasil adalah koperasi yang mampu mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi anggotanya dan dituntut untuk mampu memberikan manfaat bagi para anggotanya melalui pelayanan yang memuaskan. Kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh manajemen koperasi harus dapat dirasakan secara langsung dan tidak langsung oleh anggota sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pemberian manfaat ekonomi bagi anggotanya.

Menurut Andang K. Ardiwijaya (2001:128) manfaat ekonomi anggota terbagi menjadi dua jenis yaitu:

"Manfaat ekonomi langsung adalah manfaat ekonomi yang diterima langsung diperoleh pada saat terjadinya transaksi antara anggota dengan koperasi" sedangkan **"Manfaat ekonomi tidak langsung adalah manfaat**

ekonomi yang diterima oleh anggota bukan pada saat terjadinya transaksi dengan koperasi, melainkan diperoleh kemudian setelah berakhirnya suatu periode tertentu periode laporan keuangan dan pertanggungjawaban pengurus maupun pengawas, yakni berupa penerimaan sisa hasil usaha (SHU) bagian anggota."

Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sisa hasil usaha merupakan salah satu manfaat ekonomi anggota secara tidak langsung. Selain itu, koperasi juga harus mampu memberikan manfaat ekonomi langsung kepada anggotanya melalui pelayanan harga yang lebih rendah dari non koperasi. Jika koperasi belum memberikan manfaat ekonomi bagi anggota, maka akan berdampak pada rendahnya partisipasi anggota.

Selain dari target yang dicapai Unit Simpan Pinjam Ikopin dapat dilihat dari peran kontribusi Sisa Hasil Usaha Unit Simpan Pinjam tahun 2019.

Berikut tabel Sisa Hasil Usaha Unit Simpan Pinjam Ikopin:

Tabel 1.2. Sisa Hasil Usaha Unit Simpan Pinjam Ikopin Tahun 2019

USP 1	USP 2	USP 3	USP 4
(Rp. 49.640.853)	(Rp. 65.225.746)	(Rp. 50.809.562)	Rp. 92.494976

Sumber: Laporan Tahunan Tahun Buku 2019

Berdasarkan Tabel 1.2. dapat diketahui dan disimpulkan bahwa Kontribusi Sisa Hasil Usaha pada Unit Simpan Pinjam 1 Minus Rp. 49.640.853 artinya hal ini cukup berdampak pada perolehan Sisa Hasil Usaha KKB Ikopin.

Selain dilihat dari data Sisa Hasil Usaha dan pencapaian target, ada beberapa fenomena yang ditemukan oleh peneliti di Koperasi Keluarga Besar Institut Manajemen Koperasi Indonesia.

Berdasarkan survey pendahuluan dapat dikemukakan bahwa:

1. Terdapat kurangnya ketelitian karyawan dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehingga sering terjadi kesalahan.
2. Dalam menyelesaikan pekerjaan rutin karyawan belum dapat diselesaikan sesuai dengan standar waktu yang ditentukan.
3. Karyawan terlihat kurang menguasai dalam melakukan pekerjaan, hal ini disebabkan sebagian karyawan dalam bekerja tidak sesuai dengan bidangnya dan juga belum jelasnya deskripsi jabatan di koperasi tersebut.

Tabel 1.3. Komposisi Karyawan USP KKB IKOPIN Tahun 2019

NO	Jabatan	Jumlah
1	Manajer Umum USP	1
2	Manajer USP I	1
3	Manajer USP II	1
4	Manajer USP III	1
5	Manajer USP IV	1
6	Administrasi Pusat USP	1
7	Koordinator Operasi	1
8	Account Officier	5
9	Staff Collector	4
10	Teller	4
Total		20

Sumber: Laporan Tahunan Tahun Buku 2019

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa efektivitas kerja karyawan selama ini masih belum optimal. Hal ini diduga karena, dalam pelaksanaan Deskripsi jabatan karyawan belum dilaksanakan secara optimal, tidak diuraikan secara jelas mengenai tugas-tugas karyawan, sehingga pekerjaan yang seharusnya dapat diselesaikan hari ini terkadang harus diselesaikan pada hari berikutnya, sehingga secara tidak langsung penyelesaian pekerjaan menjadi tidak efektif atau tidak tepat waktu.

Berdasarkan fenomena yang ada di dalam latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan masalah dengan menentukan judul penelitian **"Analisis Pelaksanaan Deskripsi Jabatan Dalam Mencapai Efektivitas Kerja Karyawan."** Studi Kasus Pada Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Keluarga Besar Institut Manajemen Koperasi Indonesia.

1.2.Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena pada latar belakang masalah, untuk lebih mengarahkan pembahasan serta pemecahan masalah, maka permasalahan dapat di identifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Deskripsi Jabatan pada Koperasi Keluarga Besar IKOPIN.
2. Bagaimana Efektivitas kerja karyawan di Koperasi Keluarga Besar IKOPIN.
3. Bagaimana Pelaksanaan Deskripsi Jabatan yang seharusnya, agar dapat meningkatkan Efektivitas kerja karyawan di Koperasi Keluarga Besar IKOPIN.

1.3.Maksud Dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara menyeluruh jelas tentang Pelaksanaan Deskripsi Jabatan dalam mencapai efektivitas kerja karyawan di Koperasi Keluarga Besar IKOPIN.

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pelaksanaan Deskripsi Jabatan Karyawan di Koperasi Keluarga Besar IKOPIN
2. Efektivitas Kerja di Koperasi Keluarga Besar IKOPIN

3. Pelaksanaan Deskripsi Jabatan yang seharusnya, agar dapat meningkatkan efektivitas kerja di Koperasi Keluarga Besar IKOPIN

1.4.Kegunaan Penelitian

1.4.1.Aspek Keilmuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan minat bagi kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan manajemen koperasi pada umumnya serta manajemen sumber daya manusia pada khususnya dalam sub kajian tinjauan mengenai Deskripsi Jabatan.

1.4.2. Kegunaan praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan masukan sebagai bahan informasi bagi koperasi yang bersangkutan serta koperasi lainnya dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan Deskripsi Jabatan Karyawan Dalam Mencapai Efektivitas Kerja Karyawan.